

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, STATUS PERUSAHAAN
DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP
LUAS PENGUNGKAPAN SOSIAL DALAM LAPORAN
KEUANGAN PERUSAHAAN
(Survei pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008)

Draft Skripsi



Oleh :

Dina Amalia

05/67615

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PADANG
2010

ABSTRAK

Dina Amalia. (67615). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Status Perusahaan dan Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Luas Pengungkapan Sosial (Survei Pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2006-2008)

Pembimbing I : Dr.H.Efrizal Syofyan, SE, MSi, Ak
II : Eka Fauzihardani, SE,MSi,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan sosial, 2) pengaruh status perusahaan terhadap luas pengungkapan sosial dan 3) pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan sosial.

Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2006-2007. Penelitian menggunakan *purposive sampling*. Jenis penelitian adalah penelitian empiris kausalitas. Data diperoleh dari sumber data yaitu data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber antara lain : Pusat Refisi Pasar Modal BEI yang berupa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dan dilakukan uji t untuk melihat pengaruh secara parsial dan uji f untuk melihat pengaruh secara simultan.

Temuan penelitian menunjukkan: 1) kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan sosial dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,547 > 1,6676$. ($sig\ 0,013 < \alpha\ 0,05$). 2) status perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan sosial dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,056 > 1,6676$ ($sig\ 0,044 < \alpha\ 0,05$). 3) komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan sosial dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $25,347 > 1,6676$ ($sig\ 0,000 < 0,05$)

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya memperpanjang rentang waktu penelitian agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan menggunakan jenis industri perusahaan yang berbeda untuk dapat membandingkan tingkat pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Status Perusahaan dan Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan Sosial** (Survei pada Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2006-2008)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu perkenalkan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Efrizal Syofyan,SE,MSi,Ak selaku pembimbing I, atas perhatian dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini.
2. Eka Fauzihardani, SE,MSi,Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Syamsul Amar. B,M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
4. Ibu ketua Prodi dan Bapak sekretasis Prodi Akuntansi
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.

7. Ayah dan ibu yang telah memberikan perhatian, do'a, dan kasih sayang dan pengorbanan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Desember 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	14
1. Pengungkapan (<i>Disclosure</i>) dalam Laporan Tahunan.....	14
a. Pengertian Pengungkapan (<i>Disclosure</i>).....	14
b. Tujuan dan Manfaat Pengungkapan.....	19
c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	22
2. Kepemilikan Manajerial.....	30
3. Status Perusahaan.....	34
4. Dewan Komisaris Independen	37
5. Penelitian Relevan	44
B. Pengembangan Hipotesis	48
C. Kerangka Konseptual.....	51
D. Hipotesis	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Populasi dan Sampel.....	54
C. Jenis dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Variabel Penelitian.....	58
F. Pengukuran Variabel.....	58
G. Teknik Analisis Data dan Model	60
1. Model	61
2. Teknik Analisis	61
a. Uji Asumsi Klasik.....	61
b. Uji Model.....	63
c. Uji Hipotesis.....	64
H. Definisi Operasioanal.....	65

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	67
1. Gambaran Umum PT. Bursa Efek Indonesia (BEI).....	67
2. Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur di Indonesia.....	69
B. Deskriptif Variabel Penelitian.....	70
C. Analisis Data.....	80
1. Hasil Teknik Analisis.....	80
a. Uji Asumsi Klasik.....	80
b. Hasil Uji Model.....	84
c. Hasil Uji Hipotesis	88
D. Pembahasan.....	90

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

A. Kesimpulan	97
B. Keterbatasan dan Saran Penelitian.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Item-Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	25
2	Ringkasan Penelitian Terdahulu	47
3	Daftar Perusahaan Sampel	56
4	Indeks Pengungkapan Sosial Perusahaan Sampel Tahun 2006-2008	72
5	Kepemilikan Manajerial Perusahaan Sampel Tahun 2006-2008	74
6	Perkembangan Status Perusahaan Sampel Tahun 2006-2008	76
7	Dewan Komisaris Independen Perusahaan Sampel Tahun 2006-2008	77
8	Descriptive Statistics	79
9	Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	81
10	Uji Multikolinearitas Coefficients(a)	82
11	Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser) Coefficients(a)	83
12	Uji Autokorelasi Model Summary(b)	84
13	Uji F Statistik ANOVA(b)	85
14	Uji Koefisien Determinasi	85
15	Uji Regresi Linear Berganda	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyediaan informasi yang luas dalam laporan keuangan merupakan keharusan yang disebabkan adanya permintaan berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditor dan *stakeholders* lainnya. Informasi yang diambil dari suatu laporan keuangan perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapan (*disclosure*) dari laporan keuangan yang bersangkutan. Pengungkapan yang detail akan memberikan gambaran kinerja dan operasionalisasi perusahaan yang sesungguhnya.

Menurut Chairiri (2003:235) pengungkapan (*disclosure*) mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pertanggungjawaban kinerja ekonomi perusahaan kepada para investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan keuangan dapat dikelompokkan dalam pengungkapan yang sifatnya wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang sifatnya sukarela (*voluntary disclosure*).

Sejarah perkembangan akuntansi, yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi industri, menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal (kaum kapitalis) sehingga

mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan keberpihakan perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia.

Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat disekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan disekitar operasi perusahaan.

Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Sejauh ini perkembangan akuntansi konvensional (*mainstream accounting*) telah banyak di kritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai *Social Responsibility Accounting* (SRA) atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial. Tanggung jawab sosial diartikan bahwa perusahaan mempunyai tanggungjawab pada

tindakan yang mempengaruhi konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Selama ini produk akuntansi dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik saham, kini paradigma tersebut diperluas menjadi pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholders*.

Banyak perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan sesuai dengan apa yang diinginkan investor dan peraturan yang berlaku, sehingga investor dan *stakeholder* lainnya mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan ekonominya. Pusat perhatian perusahaan lebih kepada *stockholders* dan *bondholders*, sedangkan pihak lain sering diabaikan. Aksi protes banyak dilakukan oleh elemen *stakeholders* kepada manajemen perusahaan, mereka menuntut keadilan terhadap kebijakan upah dan pemberian fasilitas kesejahteraan yang diterapkan perusahaan. Di lain pihak banyak masyarakat yang protes atas pencemaran lingkungan akibat limbah atau polusi yang dilepas ke lingkungan, sehingga menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Untuk itulah masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya. Sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan untuk mengkonsumsi dapat terpenuhi.

Pendapat ini juga terbukti pada penelitian yang dilakukan Almilia dan Ikka (2007) serta Sudarmadji dan Lana (2007) yang mengatakan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang *go public* masih sangat rendah. Oleh sebab itu Bapepam dan Lembaga Keuangan sebagai badan pengawas pasar modal meningkatkan perannya dengan menerbitkan peraturan nomor Kep-

134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten (Perusahaan Publik). Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa item pengungkapan. Item pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) memuat antara lain : (1) Iktisar Data Keuangan Penting; (2) Laporan Dewan Komisaris; (3) Laporan Direksi; (4) Profil Perusahaan; (5) Analisis Pembahasan Manajemen; (6) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*); (7) Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan; (8) Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit. Sebagai tambahan pengungkapan minimum, item pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) mencakup antara lain : (1) Iktisar Data Keuangan Penting; (2) Laporan Dewan Komisaris; (3) Laporan Direksi; (4) Profil Perusahaan; (5) Analisis dan Pembahasan Manajemen.

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial, terutama mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan atau akibat lain yang terjadi dari kegiatannya. Namun, bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, pengungkapan kegiatan sosial seperti *Corporate Sosial Responsibility* telah diatur dalam Peraturan Bapepam No. KEP-13/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 1998) paragraph kesembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial. Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri yang mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap

pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Pernyataan PSAK tersebut merupakan manifestasi kepedulian akuntansi akan masalah-masalah sosial yang merupakan wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Menurut Sembiring (2005), *Corporate Social Disclosure* atau tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup.

Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya ada regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Tekanan pemerintah yang mengatur perusahaan dengan lingkungan sosialnya diwujudkan dalam berbagai peraturan dan undang-undang. PP No. 51/1993 dimana pemerintah membentuk peraturan Amdal yang mengharuskan perusahaan untuk menganalisis mengenai dampak lingkungan dari suatu industri atau proyek. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang No. 7 tahun 1996 mengenai perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. UU PT No. 40 Tahun 2007 yang

menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Proper (Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan, termasuk tingkat kepedulian atau tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar.

Pengungkapan sosial merupakan wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan. Melalui pengungkapan sosial pada laporan tahunan, masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan memperoleh perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tetap eksis. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut.

Manajemen sangat berperan penting dalam setiap keputusan-keputusan yang akan diambil demi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Manajemenlah yang menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Manajemen selalu berusaha mengungkapkan informasi privat yang menurut

pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tidak diwajibkan/bersifat sukarela, sehingga manajer tidak menjalankan prinsip pengungkapan (*disclosure*) dengan baik. Prinsip pengungkapan (*Disclosure Principle*) menyatakan bahwa manajer hendaknya mengumumkan seluruh informasi yang baik maupun yang buruk (Assih, 2002 dalam Johan, 2006). Hal ini terjadi karena berdasarkan teori agensi semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, dimana antara manajer (*agent*) dan investor (*principle*) memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda.

Salah satu karakteristik perusahaan yang diperhatikan manajemen dalam melakukan pengungkapan adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yaitu struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Dewi, 2005). Struktur kepemilikan saham oleh institusi, dalam hal ini institusi pendiri perusahaan bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham terbesar oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Hasil kerja manajemen akan dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban ini dapat diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga diperkirakan jumlah kepemilikan saham manajerial akan dapat memengaruhi pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

Terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk kemungkinan perusahaan yang berstatus asing memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan perusahaan domestik. Pertama, perusahaan dengan penanam modal asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya di luar negeri. Kedua, perusahaan yang berstatus asing mungkin mempunyai sistem informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Terakhir, kemungkinan juga terdapat permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan berstatus asing dari pelanggan, pemasok, analisis dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Johan (2006) diperoleh hasil bahwa status perusahaan berpengaruh signifikan terhadap IKP (Indeks Kelengkapan Pengungkapan). Status perusahaan merupakan posisi/kedudukan suatu perusahaan dalam hubungannya dengan perusahaan lain. Status perusahaan dapat dibedakan atas PMA (Pemilik Modal Asing) dan PMDN (Pemilik Modal Dalam Negeri). Perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan asing (*multinational corporate*) dapat berstatus PMA. Perusahaan dengan status yang berbeda akan memiliki *stakeholders* yang berbeda, sehingga tingkat kelengkapan pengungkapan yang harus dilakukan juga berbeda. Perusahaan dengan status PMA akan memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan perusahaan yang memiliki status PMDN karena adanya permintaan yang berbeda-beda dari *stakeholder*.

Variabel berikutnya yang akan diteliti pengaruhnya terhadap pengungkapan adalah komposisi dewan komisaris independen. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen tetapi Dewan Komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Salah satu elemen penting yang akan mempengaruhi efektivitas komisaris adalah independensi. Perusahaan yang *listed* di BEI harus mempunyai komposisi dewan komisaris yang secara proposional sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Dalam hal ini persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Komposisi dewan komisaris independen mendukung prinsip responsibilitas dalam penerapan *Corporate Governance*, yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* yaitu melindungi para *stakeholders* dari informasi yang menyesatkan, *fraud* dan *insider information* yang hanya menguntungkan beberapa pihak.

Ada beberapa kasus yang terkait dengan permasalahan sosial atas aktivitas perusahaan di Indonesia. Seperti, yang terjadi pada PT. Indorayon Utama di Porsea Sumatera Utara. Perusahaan melakukan pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah perusahaan yang mengakibatkan diberhentikannya kegiatan operasional perusahaan. Begitu juga kasus di Sidoarjo Jawa Timur, terjadinya semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas yang mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar dan menyebabkan hilangnya tempat tinggal dan mata pencarian penduduk setempat.

“Sejak beroperasi pada 2000, perusahaan tambang tembaga/emas PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, telah berhasil melaksanakan banyak program tanggungjawab sosial. Program-program ini bertumpu pada empat pilar utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat. Program pengembangan masyarakat PT NNT telah mendapat pengakuan dari pemerintah dalam bentuk beberapa penghargaan. Penghargaan PADMA Perunggu merupakan penghargaan akhir tahun 2008 bagi PT NNT atas keberhasilan program pengembangan padi pola SRI di lingkaran tambang.”

Cerita di atas merupakan sebuah gambaran fenomena baru dimana perusahaan sudah mulai menyadari tanggungjawab sosialnya dengan mengambil bagian dalam pembangunan untuk masyarakat sekitar perusahaannya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan keragaman hasil. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Anggraini (2006) menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan sosial adalah prosentase kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan kebijakan perusahaan, karena seluruh keputusan dan kegiatan bisnis perusahaan ada di tangan para manajer.

Penelitian yang dilakukan Muslim Utomo (1999) bahwa perusahaan yang berstatus PMA akan melakukan pengungkapan sosial yang lebih luas dibandingkan

dengan perusahaan yang berstatus PMDN. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2001) yang membuktikan status perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sosial, hal ini mungkin dikarenakan bahwa perusahaan yang bergantung pada modal internasional memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi keuangan yang sesuai dengan pasar uang dan modal, dimana perusahaan tersebut berharap akan mendapatkan sumber dananya..

Variabel independen berikutnya yaitu ukuran dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Collier dan Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabeni (2002) dalam Khomsiyah (2003), komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian ulang dengan melakukan penyempurnaan seperti memperpanjang waktu penelitian dari tahun 2006-2008. Penulis memilih variabel kepemilikan manajerial, status perusahaan dan komposisi dewan komisaris untuk diteliti pengaruhnya terhadap luas pengungkapan sosial. Pentingnya pengungkapan sosial untuk diteliti, agar perusahaan dapat memonitor dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas atau kegiatan perusahaan.

Penelitian ini akan mengambil sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2006-2008. Alasannya, perusahaan manufaktur lebih banyak berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya atau lebih dekat dengan lingkungan sosial daripada perusahaan nonmanufaktur. Oleh karena itu, perusahaan

manufaktur akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan nonmanufaktur.

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, dengan judul **”Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Status Perusahaan dan Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap Luas Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Keuangan Perusahaan.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejahteramana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan sosial.
2. Sejahteramana pengaruh status perusahaan terhadap luas pengungkapan sosial.
3. Sejahteramana pengaruh dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan sosial.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris:

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan sosial.
2. Pengaruh status perusahaan terhadap luas pengungkapan sosial.
3. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna untuk mendapatkan pengetahuan sehubungan dengan kepemilikan manajerial, status perusahaan dan komposisi dewan komisaris independen yang mempengaruhi luas pengungkapan sosial dalam sebuah perusahaan.
2. Bagi investor, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan referensi sebelum mengambil keputusan investasi.
3. Bagi peneliti yang akan datang, dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan teori bagi penelitian berikutnya dimasa datang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan

a. Pengertian Pengungkapan (*Disclosure*).

Kata pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chairiri, 2003:235).

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (*financial statement*). FASB mengidentifikasi lingkup (*scope*) informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit sebagai berikut:

- 1) Statement keuangan (*financial statements*).
- 2) Catatan atas stateman keuangan (*note to financial statements*).
- 3) Informasi pelengkap (*supplementary informasion*).
- 4) Sarana pelaporan keuangan lain (*other means of financial reporting*).
- 5) Informasi lain (*information other*).

Komponen (1) dan (2) merupakan satu kesatuan yang disebut statemen keuangan dasar (*basic financial statements*) yang merupakan produk atau hasil dari apa yang oleh Paton dan Littleton (1970) disebut dengan rerangka atau struktur akuntansi pokok (*basic accounting structure*). Pelaporan keuangan mencakupi semua informasi yang dapat disediakan oleh manajemen yaitu komponen (1) sampai dengan (4). Walaupun dapat disediakan oleh manajemen, pengungkapannya tidak selalu dapat diwajibkan (*mandatory*) oleh penyusun standar melalui standar akuntansi atau oleh badan pengawas (seperti *Security and Exchange Commission/SEC*), sedangkan di Indonesia diatur oleh Bapepam dan LK melalui peraturan-peraturannya. Penyusun standar (FASB atau Dewan Standar Akuntansi/IAI) dapat mewajibkan pengungkapan untuk komponen (1) sampai (3) dan untuk komponen (3) tingkat wajibnya hanya sampai pada batas sangat merekomendasi (*srongly recommend*). Jadi, jika secara praktis pengungkapan wajib melalui standar akuntansi hanya diberlakukan untuk komponen (1), (2) dan dalam kondisi tertentu komponen (3).

Menurut Hendriksen (2002:429) pengungkapan (*disclosure*) adalah penyampaian (*release*) informasi. Para akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam pengertian yang agak lebih terbatas, yaitu penyampaian informasi keuangan suatu perusahaan dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Hal ini menyebabkan informasi yang cukup (*suffient information*) harus diungkapkan, agar dasar untuk pengambilan keputusan dan prediksi terhadap pengambilan investasi dimasa yang akan datang akurat dan dapat dipercaya.

Wolk (1991) dalam Bambang (2006:9) mengemukakan bahwa pengungkapan merupakan informasi yang ada di dalam laporan keuangan maupun komunikasi pelengkapan yang mencakup catatan kaki, peristiwa setelah pelaporan, analisis manajemen tentang operasi yang akan datang, peramalan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan. Laporan keuangan dan komunikasi pelengkap tersebut disebut sebagai pelaporasn keuangan (*financial reporting*).

b. Tujuan dan Manfaat Pengungkapan

Alasan utama mengapa suatu pengungkapan diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* dalam pengambilan keputusan investasi. Berkaitan dengan keputusan investasi, investor memerlukan tambahan informasi yang tidak hanya informasi keuangan tapi juga informasi non keuangan. Kebutuhan tersebut didorong oleh adanya perubahan manajerial yang menyebabkan terjadinya perluasan kebutuhan

investor akan informasi baru yang mampu menginformasikan hal-hal yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan perusahaan.

Suawardjono (2005:580) mengemukakan tujuan dari pengungkapan ada tiga, antara lain:

1) Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*).

2) Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

3) Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju

sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

Sedangkan menurut Ahmed Riahi dan Belkoui (2000), tujuan dari pengungkapan ada enam, yaitu:

- a) Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
- b) Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
- c) Untuk menyediakan informasi dalam membantu investor dan kreditor menentukan risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan belum diakui.
- d) Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antarperusahaan dan antartahun.
- e) Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa datang.
- f) Untuk membantu investor dalam menetapkan *return* dan investasinya.

Dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SCAF) No.1 FASB (1980) menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan (*financial*

reporting) tidak terbatas pada isi laporan keuangan (*financial statement*). Dengan kata lain, cakupan pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan laporan keuangan. FASB (*Financial Accounting Standard Board*) menyebutkan:

“Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik dan lain-lain”.

Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam SCAF No. 1 dapat diringkas sebagai berikut:

“Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional”. (paragraph 34)

c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ada dua jenis ungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal. Yang pertama adalah ungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu Negara. Sedangkan yang kedua adalah ungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu ungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan sering juga disebut sebagai *Corporate Social Disclosure (CSR)*, *Corporate Social Reporting*, *Social Accounting*. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela (*voluntary disclosure*). Karenanya, perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Wibosono (2007: 152) mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep ketika perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan lebih baik dan lingkungan yang lebih lestari.

CSR menunjukkan sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aktifitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat dipenuhi, sehingga membuat perusahaan mencoba mengungkapkan informasi sosialnya sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Ebert (2003) dalam Rosmasita (2007:8) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai usaha perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen-komitmennya terhadap kelompok-kelompok dan individual-individual dalam

lingkungan perusahaan tersebut, termasuk didalamnya adalah pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, para karyawan, dan investor.

Dewasa ini pengungkapan tanggung jawab sosial sering menjadi bahan yang sedang didiskusikan oleh pihak manajemen perusahaan, karena dalam kegiatan perusahaan sekarang ini pengungkapan tanggung jawab sosial sangat diperlukan. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang bagus semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Menurut Soros (2002:16) pengungkapan tanggung jawab sosial ini konsisten dengan upaya-upaya *Good Governance*. Di sini jelaslah bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial ini menuntut perusahaan lebih transparan dalam mengelola aktivitas perusahaan, sehingga resiko bisnis bisa dihindari. Karena perusahaan rentan terhadap tuduhan korupsi yang secara langsung mengganggu ketidakamanan sosial dan merusak prospek komersil jangka panjang.

Pelaksanaan CSR akan membawa berbagai manfaat untuk perusahaan. Menurut Susanto (2007: 30), pelaksanaan CSR akan bermanfaat untuk:

- 1) Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.
- 2) Pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.

- 3) Meningkatkan loyalitas karyawan dan kebanggaan karyawan terhadap perusahaan.
- 4) Memperbaiki dan mempererat hubungan perusahaan dengan para *stakeholders*.
- 5) Meningkatkan penjualan.
- 6) Insentif-insentif lainnya seperti pajak dan perlakuan khusus lainnya.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan disebut *sustainability reporting*. Menurut Darwin (2004) *Sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *Sustainability reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. *Sustainability report* harus menjadi dokumen strategis yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *sustainability development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industri.

Menurut Gray et. al. (1998:14), ada dua pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat keuangan sebagai pemakai utama pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan dan cenderung membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan.

Pendekatan alternatif kedua dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dan pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Keragaman dalam pengungkapan tanggung jawab sosial disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasan dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat. Standar pelaporan pertanggungjawaban sosial sampai saat ini belum mempunyai standar yang baku, hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang berhubungan dengan biaya dan manfaat sosial. Perusahaan dapat membuat sendiri model pelaporan pertanggungjawaban sosialnya.

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penilaian CSR menurut Susanto (2007:76) sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim kepemimpinan CSR.
- 2) Merumuskan definisi CSR.
- 3) Melakukan kajian terhadap dokumen, proses, dan aktivitas perusahaan.
- 4) Mengidentifikasi dan melibatkan stakeholders kunci.

Selanjutnya Sembiring (2005) dengan memodifikasi bentuk pengungkapan sosial Hackson dan Milne (1999) dalam Sembiring (2005) sesuai dengan kondisi di Indonesia, bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:

Tabel 1
Item-Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

KATEGORI
1. Lingkungan
1. Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi
2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi;
3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi;
4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi;
5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas;
6. Penggunaan material daur ulang;
7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan;
8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan;
9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan
10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah
11. Pengolahan limbah;
12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan;
13. Perlindungan lingkungan hidup.
2. Energi
1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi;
2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi;
3. Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang;
4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi;

5. Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk
6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk;
7. Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan.
3. Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja
1. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja;
2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental;
3. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja;
4. Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja
5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja;
6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja
7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja;
8. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja
4. Lain-lain tentang Tenaga kerja
1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat
2. Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial;
3. Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan
4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat
5. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja
6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan
7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja
8. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan
9. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan;
10. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi
11. Mengungkapkan persentase gaji untuk pensiun;
12. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan
13. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
14. Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada
15. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut
16. Mengungkapkan disposisi staff - di mana staff ditempatkan
17. Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka;
18. Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga kerja;
19. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja;
20. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain.
21. Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja;

22. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan;
23. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah;
24. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh
25. Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja
26. Peningkatan kondisi kerja secara umum
27. Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja;
28. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja
5. Produk
1. Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya,
2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk;
3. Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk
4. Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan;
5. Membuat produk lebih aman untuk konsumen;
6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan
7. Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk;
8. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan
9. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan
10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (Misalnya ISO 9000).
6. Keterlibatan Masyarakat
1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni
2. Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar
3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat;
4. Membantu riset medis;
5. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni
6. Membiayai program beasiswa
7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat;
8. Mensponsori kampanye nasional;
9. Mendukung pengembangan industri lokal
7. Umum
1. Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat
2. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan

selain yang disebutkan di atas

Sektor Industri

- 1 = Agriculture Forestry and Fishing
- 2 = Animal Feed and Husbandry
- 3 = Mining and Mining service
- 4 = Construction
- 5 = Manufacturing
- 6 = Transportation Service
- 7 = Communication
- 8 = Whole Sale and Retail Trade
- 9 = Banking, Credit Agencies Other than Bank, securities, Insurance.
- 10 = Hotel and Travel Service
- 11 = Holding and Other Investment
- 12 = Others

Akuntansi pertanggungjawaban sosial perusahaan menurut *National Association of Accountants* (NAA) mempunyai dua tujuan dalam Yuningsih (2000:5), yaitu:

a) Tujuan internal

Untuk memungkinkan perbaikan terhadap proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini berhubungan dengan proses penetapan tujuan, sasaran, prioritas dalam kaitannya dengan perencanaan sumber daya dan mendorong para manajer untuk memikirkan dampak sosial dari setiap keputusannya, memberikan dasar untuk mengadakan evaluasi internal terhadap prestasi sosial perusahaan.

b) Tujuan eksternal

Untuk memberikan dasar yang seragam bagi pelaporan ekstern dan memungkinkan adanya pemeriksaan yang independen atas laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, pengungkapan sosial tidak hanya bertujuan untuk keperluan eksternal tetapi juga untuk keperluan internal. Untuk keperluan eksternal, pengungkapan sosial semata-mata tidak untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan sosial dan telah ikut berperan serta dalam masalah sosial, tetapi juga untuk mengevaluasi *social performance* perusahaan, karena dengan *social performance* masyarakat dapat membentuk image positif atau negatif.

Sedangkan untuk keperluan internal, yang berarti untuk keperluan pihak manajemen adalah untuk sistem pengendalian manajemennya, yaitu:

1) Untuk Evaluasi

Manajemen tentunya memerlukan informasi untuk menilai sejauh mana efektivitas proyek kegiatan eksternal mencapai tujuan sosialnya.

2) Untuk mempertahankan diri dari tuduhan masyarakat tentang kepeduliannya terhadap masalah sosial.

3) Untuk mengakomodasi tujuan sosial dan kemanusiaan.

2. Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan dalam sebuah perusahaan adalah media kontrol pemegang saham terhadap perusahaan yang diwakili oleh dewan direksi dan manajer. Pemegang saham memantau dewan direksi dan manajer dalam setiap pengambilan keputusan dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan perusahaan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana pihak-pihak manajemen memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain pihak manajemen tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. Seorang pemegang saham ikut memiliki segala sesuatu yang menjadi milik perusahaan dan juga ikut dalam hal menanggung resiko dan kewajiban perusahaan.

Berdasarkan klasifikasi kepemilikan saham menurut Frestawati (2007:22) kepemilikan saham akan berdampak pada kebijaksanaan yang diambil oleh pemilik saham, di antaranya adalah:

- a. Perusahaan yang dikontrol oleh keluarga, individu-individu atau sebuah kelompok elit yang berasal dari dalam perusahaan menjadikan perusahaan mempunyai tingkat kebijaksanaan yang luas (kepemilikan ini disebut kepemilikan manajerial)

- b. Perusahaan yang dikontrol oleh pemegang saham dari luar lingkungan perusahaan seperti perusahaan lain, institusi keuangan mempunyai kebijakan yang ketat dan terbatas (kepemilikan ini sering disebut kepemilikan institusional)
- c. Perusahaan yang tidak mempunyai sentral pengendalian dimana manajemen memiliki kebijakan yang tidak terbatas dalam penentuan produk dan aliran ke pasar modal.

Peran serta manajemen dalam perusahaan sangatlah penting, karena dengan adanya manajemen, semua aktivitas perusahaan lebih terkendali. Wild (2005:90) menyatakan bahwa manajer memiliki kontrol utama atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Penilaian manajemen diperlukan dalam rangka penentuan angka-angka dalam laporan keuangan. Penilaian manajer dilakukan karena standar akuntansi sering kali memungkinkan manajer untuk memilih diantara alternatif metode akuntansi dan juga karena estimasi diperlukan untuk dapat menghitung angka akuntansi. Walaupun demikian peran serta pihak lain dalam perusahaan juga perlu dipertimbangkan, meskipun masing-masing perusahaan mereka mempunyai kepentingan yang berbeda.

Keraf (1998:121) menyatakan pada tingkat operasional, tanggung jawab sosial dan moral perusahaan diwakili secara formal oleh pihak manajemen. Pihak manajemen telah menerima kepercayaan untuk menjalankan perusahaan. Oleh karena seluruh keputusan dan kegiatan bisnis perusahaan ada ditangan manajer,

maka pada tempatnya tanggung jawab sosial dan moral perusahaan juga dipikul oleh mereka.

Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Perbedaan kepentingan pihak-pihak dalam perusahaan menyebabkan masing-masing berlomba untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan dengan kepentingan perusahaan. Pihak manajemen lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak produktif, seperti kemakmuran individu, keselamatan kerja, gaya hidup, dan lain-lain. Hal ini juga menuntut pihak manajer untuk memaksimalkan kepentingan dirinya, karena semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan.

Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya

untuk aktivitas tersebut (Gray, et. Al., 1998:17). Hal ini menunjukkan semakin besarnya kepemilikan manajemen didalam perusahaan membuat mereka lebih maksimal mengelola aktivitas perusahaan, mereka dapat menentukan tujuan perusahaan, kegiatan perusahaan, dan semua yang berhubungan dengan perusahaan untuk kelngsungan hidup perusahaan nantinya.

Kepemilikan manajerial diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial (Iturriaga dan Sanz ,1998) dalam (Fakhrial, 2007:23). Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham yang dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam mengambil keputusan (direktur dan komisaris). Variabel ini diukur dengan MOWN, dengan rumus:

$$\text{MOWN} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki komisaris dan direktur}}{\text{Total Saham}}$$

3. Status Perusahaan

Secara abstrak status berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Menurut Paul B Horton (1991) dalam Bustaman (2001: 63) status adalah posisi atau peringkat seseorang dalam kelompok atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Apabila dikaitkan dengan perusahaan dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki suatu posisi dalam hubungannya dengan kelompok/perusahaan lain, baik dalam sebuah kerjasama atau dalam kepemilikan modal.

Timbulnya status perusahaan berhubungan dengan kegiatan afiliasi perusahaan. Menurut Amilia dan Ikka (2007) "Afiliasi dapat diartikan sebagai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama hubungan, yaitu hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama". Kegiatan afiliasi perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan perusahaan dalam negeri atau dengan perusahaan asing (multinasional), sehingga perusahaan tersebut dapat berstatus Pemilik/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Pemilik/Penanaman Modal Luar Negeri (PMA).

Peraturan yang mengatur tentang pembagian status perusahaan terdapat dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terdapat dalam pasal 1 ayat (2) dan (5) yang menyatakan bahwa:

"Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri". (pasal 1 ayat 2)

"Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia". (pasal 1 ayat 5)

Berdasarkan penjelasan di atas, PMDN dapat diartikan sebagai suatu bentuk penanaman modal usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri

(perseorangan, badan usaha dan pemerintah Indonesia) di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) terdapat dalam dalam UU No. 25 tahun 2007 dalam pasal 1 ayat (3) dan (6) yang menyatakan bahwa:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. (pasal 1 ayat 3)

“Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/ataupemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”. (pasal 1 ayat 6)

Pengertian PMA dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk penanaman modal usaha yang dilakukan oleh penanam modal asing meliputi perseorangan warga negara asing, badan usaha ataupun pemerintah asing yang menggunakan modal asing sepenuhnya/ berpatungan dengan modal dalam negeri di wilayah Negara Republik Indonesia.

Fitriani (2001) membedakan status perusahaan menjadi tiga yaitu Penanam Modal Asing (PMA), dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan BCFIN (2007) mengelompokan status perusahaan atas PMDN, PMA dan non PMA dan PMDN. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur status perusahaan seperti yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Pengukuran dilakukan

dengan memberikan notasi 0 untuk perusahaan PMDN dan diberi notasi 1 untuk perusahaan PMA.

Menurut Susanto (1992) dalam Fitriani (2001), Afiliasi perusahaan dengan perusahaan asing (multinasional) mungkin akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. Terdapat beberapa alasan mengenai dugaan ini. Pertama, perusahaan berbasis asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik, misalnya dalam bidang akuntansi, dari perusahaan induknya diluar negeri. Kedua, perusahaan berbasis asing mungkin mempunyai sistem informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. Ketiga, kemungkinan juga terdapat permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, analisis dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan dengan status yang berbeda akan memiliki stakeholders yang berbeda, sehingga tingkat kelengkapan pengungkapan yang harus dilakukan pun berbeda. Perusahaan dengan status penanam modal asing (PMA) akan memberikan pengungkapan yang lebih luas dibanding perusahaan domestik atau disebut juga dengan perusahaan dengan status penanam modal dalam negeri (PMDN).

Perusahaan besar dianggap mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil. Fitriani (2001) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa status perusahaan mempunyai hubungan dengan kelengkapan pengungkapan. Perusahaan dengan status PMA akan memiliki indeks

kelengkapan pengungkapan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang berstatus lainnya.

Suripto (1999) dalam Johan (2006) menyatakan bahwa afiliasi perusahaan dengan perusahaan asing mungkin akan melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan domestic, ada tiga alasan mengenai dugaan ini yaitu (1) Adanya perhatian yang lebih baik dari perusahaan induknya. (2) Memiliki sistem informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. (3) Permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, analis dan masyarakat pada umumnya.

4. Dewan Komisaris Independen

Menurut *Forum for Corporate Governance* (FCGI) (www.cic-fcgi.org) perusahaan yang ada di Indonesia menganut sistem dua tingkat (*Two Tiers System*), dimana perusahaan mempunyai dua badan terpisah yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen tetapi Dewan Komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategis perusahaan,

mengawasi manajemen mengelola perusahaan serta terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan satu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkat efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dari kesuksesan perusahaan.

Dalam Zuriatina (2004:18), menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu pasal 97 UUPT, komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada direksi. Lebih lanjut pasal 98 UUPT menegaskan bahwa komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseorangan. Disamping itu, UUPT juga menetapkan, bahwa orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan sebagai anggota dewan komisaris. Mengenai kepemilikan saham anggota dewan komisaris, UUPT menetapkan bahwa anggota dewan komisaris wajib melaporkan kepada perusahaan tentang kepemilikan sahamnya dan atau anggota keluarganya pada perusahaan tersebut atau perusahaan lain.

Komisaris sebuah perusahaan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka diangkat untuk satu periode tertentu, dan apabila dimungkinkan, mereka bisa diangkat kembali. Di dalam UUPT ditetapkan bahwa anggota dewan komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS.

Menurut *Indonesian Code for Corporate Governance* dalam Dwi (2007:31) fungsi utama dewan komisaris adalah memberikan supervisi kepada direksi dalam menjalankan tugasnya. Dewan komisaris juga berkewajiban pendapat dan saran apabila diminta direksi. Salah satu elemen penting yang akan mempengaruhi efektivitas komisaris adalah independensi. Dalam menjalankan tugasnya tersebut para anggota dewan komisaris wajib bersikap independen.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komisaris independen merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* untuk menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholders*, dan pengungkapan semua informasi meski ada konflik kepentingan

(Sulistyanto 2008). Kriteria tentang dewan komisaris independen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
- b. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
- c. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
- d. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- f. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.

- g. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris dalam Sutojo (2008) meliputi:

- a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*).
- b. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*).
- c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi

perusahaan. Tugas ini untuk memberikan perlindungan hak-hak para pemegang saham (*fairness*).

- d. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu, komisaris independen harus melaksanakan transparansi (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) atas hal ini.
- e. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (OECD Principles of Corporate Governance). Proses keterbukaan (*transparency*) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

Tanggungjawab Komisaris Independen menurut OECD dalam Sutojo (2008) : Menyusun strategi dan mengarahkan dan menyusun kebijaksanaan operasi bisnis.

- a. Memonitor kinerja manajemen senior perusahaan dalam mencapai tujuan strategis perusahaan.
- b. Menghasilkan keuntungan yang optimal bagi para pemegang saham.
- c. Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perusahaan; misalnya kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas, kepentingan pemegang saham dan kreditur.
- d. Menjaga perusahaan mereka selalu mematuhi undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang perpajakan, ketentuan hukum tentang persaingan yang sehat, perburuhan, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam Sutujo (2008) disebutkan juga bahwa tanggung jawab dewan komisaris independen adalah menjaga perusahaan mereka agar selalu mematuhi undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang perpajakan, ketentuan hukum tentang persaingan yang sehat, perburuhan, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu dewan komisaris independen juga bertanggung jawab melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non-pemegang saham, termasuk karyawan perusahaan, para kreditur, pelanggan, perusahaan pemasok dan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan atau proyek yang mereka dirikan.

Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

5. Penelitian Relevan

Penelitian pengungkapan sosial dalam laporan tahunan telah banyak dilakukan di negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia. Hackston dan Milne, (1996) dan Andrew et.al., (1989) dalam Utomo, (1999) membuktikan bahwa perusahaan besar yang ada di Newzealand, Malaysia, dan Singapura melakukan pengungkapan sosial lebih luas dibanding dengan perusahaan kecil.

Muslim Utomo (1999), telah melakukan penelitian terhadap pola perusahaan-perusahaan yang listing di BEJ (Bursa Efek Jakarta) maupun BES (Bursa Efek Surabaya) dalam melakukan pengungkapan sosialnya. Pola tersebut meliputi tema, item, dan lokasi di dalam laporan tahunan, serta tipe pengungkapan sosialnya. Selain itu, juga meneliti perbedaan pola praktek pengungkapan sosial yang berdasarkan status perusahaan PMA dan PMDN. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa masih sedikit praktek pengungkapan sosial yang diungkap dalam annual report perusahaan edisi 1998. Hal ini berarti, perusahaan belum sepenuhnya memanfaatkan laporan tahunan sebagai sarana komunikasi antara pihak manajemen dengan stakeholder-nya. Penelitian ini juga membuktikan bahwa perusahaan yang berstatus PMA lebih luas dalam pengungkapan sosialnya dibanding dengan perusahaan yang berstatus PMDN. Pengambilan sampel atas penelitian Muslim Utomo, berupa perusahaan-perusahaan yang listing di BEJ dan BES pada tahun 1998 dan menggunakan instrumen pengukur pengungkapan sosial berupa suatu daftar yang diciptakan sendiri yang masih bersifat subyektif, sehingga kurang teruji validitasnya.

Penelitian Fitriani (2001) mengenai signifikansi perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan pengungkapan sosial, pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen yaitu kelengkapan pengungkapan wajib dan sosial, sedangkan variabel independen terdiri atas *size* perusahaan, jenis perusahaan, status perusahaan, likuiditas dan *leverage*. Dari

hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sistematis mengenai tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEJ. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel *size* perusahaan dan status perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial. Akan tetapi *leverage* dan likuiditas tidak mempengaruhi pengungkapan wajib dan pengungkapan sosial.

Penelitian Sabeni (2002) dalam Khomsiyah (2003) yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif dengan luas pengungkapan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah (2003) yang mengukur seberapa luas hubungan antara Corporate Governance dengan luas pengungkapan memperlihatkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi dikarenakan dalam hasil penelitian *p-value* lebih besar dari $\alpha 5\%$ ($0.289 > 0.05$). Penelitian ini juga tidak dapat membuktikan perusahaan yang mempunyai prosentase kepemilikan manajerial besar atau kecil yang akan mempengaruhi manajer perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi suatu perusahaan

Anggraini (2006) melakukan penelitian mengenai pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan. Penelitian dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ dengan periode 2000-2004. Penelitian ini menggunakan variabel prosentase kepemilikan manajemen, tingkat leverage,

biaya politis, dan profitabilitas. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa persentase kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh positif terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial.

Sembiring (2005) melakukan penelitian terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEJ. Penelitian ini dilihat dari karakteristik perusahaan yaitu: ukuran perusahaan, profitabilitas, *profile* perusahaan, ukuran dewan komisaris dan leverage. Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti yang terdapat pada *Indonesian Capital Market Directory* 2002. Dari hasil penelitian dihasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, *profile* dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan profitabilitas dan leverage, peneliti tidak berhasil menemukan hubungan keduanya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya penjelasan di atas akan disajikan secara ringkas di dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
Muslim Utomo (1999)	Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia (Studi Perbandingan antara Perusahaan-Perusahaan berstatus PMA dan PMDN)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sedikit praktek pengungkapan sosial yang diungkap dalam annual report perusahaan edisi 1998. Perusahaan yang berstatus PMA lebih luas dalam pengungkapan sosialnya dibanding dengan perusahaan PMDN
Fitriani (2001)	Signifikasi Perbedaan Pengungkapan Wajib dan Pengungkapan Sosial pada Laporan Keuangan Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ	Membuktikan bahwa variabel <i>size</i> perusahaan dan status perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial. Akan tetapi <i>leverage</i> dan likuiditas tidak mempengaruhi pengungkapan wajib dan pengungkapan sosial.
Sabeni (2002) dalam Khomsiyah (2003)	Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan	Menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan.
Anggraini (2006)	Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Keuangan Tahunan	Penelitian menyimpulkan bahwa persentase kepemilikan manajemen dan status perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial. Sedangkan ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial.
Sembiring (2005)	Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta	Dari hasil penelitian dihasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, <i>profile</i> dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan profitabilitas dan <i>leverage</i> , peneliti tidak berhasil menemukan hubungan keduanya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan antara Kepemilikan Manajerial dengan Luas Pengungkapan Sosial

Seorang investor memerlukan keputusan yang teliti untuk melakukan transaksi saham. Keputusan dalam hal investasi saham meliputi keputusan untuk membeli, menjual, dan menahan sahamnya. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental, faktor teknis, dan faktor sentimen pasar.

Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Dari uraian pengembangan hipotesis di atas, maka hipotesis pertama yang dapat diambil adalah :

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sosial.

2. Hubungan antara Status Perusahaan dengan Luas Pengungkapan Sosial

Karena investor di seluruh dunia menuntut informasi yang lebih detail dan lebih tepat waktu, tingkat pengungkapan sosial semakin meningkat, baik di negara-negara dengan pasar yang sudah maju maupun pasar yang sedang berkembang. Menurut Chairiri (2003:247) beberapa bukti menunjukkan bahwa perusahaan yang makin menggantungkan kepada modal internasional, maka ada kecendrungan bahwa perusahaan tersebut mengungkapkan informasi keuangan yang sesuai dengan pasar uang dan modal, dimana perusahaan tersebut berharap akan mendapatkan sumber dananya.

Studi yang dilakukan oleh Barret (1977) dalam Chairiri (2003:247) yang membandingkan laporan keuangan 15 perusahaan publik besar di Amerika, Inggris, Jepang, Perancis, Jerman, Belanda dan Swedia membuktikan bahwa ada hubungan antara tingkat dan kualitas pengungkapan laporan keuangan dengan tingkat efisiensi pasar modal negara mereka. Fred Choi (1974) juga menemukan bukti bahwa ada hubungan langsung antara perbaikan pengungkapan laporan keuangan dengan masuknya perusahaan dalam pasar modal internasional sehingga perusahaan disebut dengan *multinational corporate*.

Afiliasi perusahaan dengan perusahaan asing mungkin akan melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan domestik (Suripto:1999) dalam Johan (2006) mengemukakan tiga alasan mengenai dugaan

ini yaitu (1) Adanya perhatian yang lebih baik dari perusahaan induknya. (2) Memiliki sistem informasi manajemen yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan pengendalian internal dan kebutuhan informasi perusahaan induknya. (3) Permintaan informasi yang lebih besar kepada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, analis dan masyarakat pada umumnya.

Hipotesis kedua yang dapat diambil berdasarkan uraian tersebut adalah :

H2 : Status perusahaan dengan penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sosial.

3. Hubungan antara Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan Sosial

Keberadaan komisaris independen mendukung prinsip responsibilitas dalam penerapan *Corporate Governance*, yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Pada kenyataannya praktik *Corporate Governance* di Indonesia masih lemah. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada keharusan bagi perusahaan terdaftar untuk mengungkapkan tentang kondisi dan struktur *Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab dan independensi dewan komisaris.

Tanggung jawab dewan komisaris independen adalah menjaga perusahaan agar selalu mematuhi undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, perburuhan, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu dewan komisaris independen juga bertanggung jawab melindungi hak dan kepentingan

para anggota *stakeholders* non-pemegang saham, termasuk karyawan perusahaan, para kreditur, pelanggan, perusahaan pemasok dan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan atau proyek yang mereka dirikan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang ketiga yang dapat diambil adalah :

H3 : Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sosial.

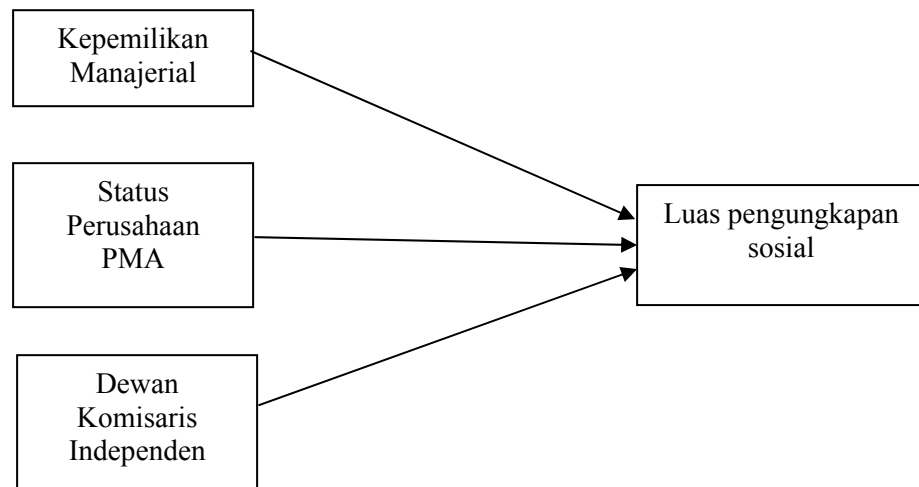
C. Kerangka Konseptual

Kepemilikan manajerial oleh beberapa peneliti dipercaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.

Status perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan menurut status penanaman modalnya, yaitu modal asing dan modal dalam negeri. Perusahaan dengan modal asing diperkirakan lebih banyak menyajikan pengungkapan sosial dalam laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan dengan modal dalam negeri. Hal ini mungkin dikarenakan perusahaan dengan penanam modal asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik, mempunyai sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien.

Komposisi dewan komisaris independen mendukung prinsip tanggung jawab dalam penerapan *Corporate Governance*, yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan para pemakai laporan keuangan yang berkepentingan.

Untuk lebih jelas dan terarah, maka dalam penulisan ini penulis membuat kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan hipotesis untuk mendukung jawaban atas permasalahan yang ada. Perumusan hipotesis tersebut adalah :

- H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Sosial.
- H2 : Status Perusahaan PMA berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Sosial.
- H3 : Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan Sosial.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepemilikan Manejerial perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia.
2. Status perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia.
3. Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, dari model penelitian yang digunakan diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan 11,8% sedangkan 88,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti, sehingga variabel penelitian yang

digunakan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan keterbatasan yang melekat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas penungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini masih relatif besar, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan menambah atau menggunakan variabel lain yang diduga dapat memberikan estimasi yang lebih baik terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Bagi perusahaan Emiten hendaknya meningkatkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan keuangan tahunan, yang dapat meningkatkan citra perusahaan yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan serta merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh *stakeholder*.
3. Bagi investor dan pengguna laporan keuangan sebaiknya memperhatikan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan termasuk informasi sosial perusahaan dimana informasi tersebut berguna untuk pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Riahi, Belkoui. 2000. *Teori Akuntansi*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Almilia, Luciana Spica dan Ikka Retrinasari. 2007. Analisis pengaruh karakteristik perusahaan Terhadap kelengkapan pengungkapan dalam Laporan tahunan perusahaan manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. (<http://spicaalmilia.files.wordpress.com>). Diakses tanggal [17 Mei 2009]).
- Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Arens & Loebbeck. 1996. *Auditing*. Edisi Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- Bapepam. 2002. "Press Release Badan Pengawas Pasar Modal" (<http://www.bapepam.go.id>). Diakses tanggal [31 Mei 2009].
- Bapepam. 2006. "Peraturan Pasar Modal Indonesia". (<http://www.bapepam.go.id>). Diakses tanggal [13 April 2009].
- BCFIN. 2007. *Indonesia Capital Market Directory (ICMD) 2006*. Jakarta: Institut for Economic dan Financial Research.
- _____. 2008. *Indonesia Capital Market Directory (ICMD) 2007*. Jakarta: Institut for Economic dan Financial Research.
- Bustamam. 2001. *Pengantar Sosiologi*. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.
- Chairiri, Anis dan Imam Gozali. 2003. *Teori Akuntansi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Choi, Frederick D.S dan Gary K. Meek. 2005. *International Accounting*, Buku Satu, Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.